**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki posisi strategis di dunia, karena terletak diantara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia serta dua samudera yaitu samudera Indonesia dan samudera Pasifik. Dengan posisi tersebut telah membawa pengaruh signifikan terhadap peran negara Indonesia di kancah percaturan dunia internasional. Namun demikian posisi tersebut juga membawa dampak kurang baik yaitu menjadi ajang perebutan pengaruh berbagai kepentingan negara-negara lain didunia. Sehingga tidak mengherankan jika banyak negara-negara kawasan lainnya yang memiliki kepentingan dengan Indonesia, dengan berbagai latar belakang kepentingan. Salah satu negara kawasan yang intensif memelihara hubungan bilateral adalah negeri kangguru Australia.

Sejarah hubungan kerjasama pertahanan antara Indonesia (Tentara Nasional Indonesia/TNI) dengan Australia (*Australian Defence Force*), telah berjalan cukup lama dan walaupun terus mengalami pasang surut. Indonesia dan Australia mengawali kerjasama pertahanannya sejak 1968 dengan program pemetaan di Indonesia. Selanjutnya pada dekade 1980-an, kerjasama tersebut diwadahi dalam satu lembaga yang disebut “Indonesia-Australia *Defence Cooperation Program* (DPC). Ini memiliki kegiatan rutin setiap tahun berupa pertemuan yang dilaksanakan secara bergiliran di Australia dan Indonesia.[[1]](#footnote-2)

Hubungan Indonesia dengan Australia telah terjalin sejak awal kemerdekaan. Australia merupakan salah satu negara yang memberikan dukungan politis terhadap perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya. Australia juga merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dukungan Pemerintah Australia terhadap kemerdekaan Indonesia yang telah dijajah selama 350 tahun oleh Belanda, yang paling dirasakan antara 1947-1950. Pada mulanya, Australia tidak ingin terlibat terlalu jauh dalam persoalan kolonial di Indonesia,dan berusaha memberikan simpati kepada usaha-usaha penyelesaian persoalan kemerdekaan, yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda dan para nasionalis Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka yakni masa pemerintahan Soekarno, hubungan Indonesia dengan Australia mengalami pasang surut. Sama dengan masa pemerintahan Soeharto, BJ Habibie, Gus Dur, Megawati termasuk pada masa pemerintahan SBY. Pada masa pemerintahan Soekarno semangat politik luar negeri Indonesia sangat konsisten menjalankannya sesuai dengan konstitusi UUD 1945 yaitu politik luar negeri yang bebas aktif ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun masih tetap menggaris bawahi semangat anti kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk apapun juga. Dalam menyikapi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, pemerintah Australia pasti tidak ada rasa kekhawatiran, sebab tidak bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Australia dan khususnya negara Amerika Serikat sebagai pimpinan blok barat. Namun yang jelas membuat Australia dan sekutunya panas telinganya mereka merasa tersentil ketika Bung Karno dalam kebijakan politik luar negerinya yang anti imperialisme dan kolonialisme. Sebagian besar bangsa-bangsa Asia dan Afrika masih memperjuangkan nasib mereka untuk mendapatkan kemerdekaannya dan sebagian dari mereka masih dalam kungkungan kolonialisme barat dan sekutunya.

Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Bung Karno yang menyatukan bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk saling bahu membahu, untuk meningkatkan kerjasama politik yang tidak memihak, yang dikenal dengan gerakan non blok. Bukan hanya itu saja yang membuat Australia terhalangi kepentingannya oleh pemerintah Indonesia dikala itu, namun yang membuat mereka sangat khawatir dan ketakutan adalah semakin suburnya partai yang berbasis sosialis komunis, tumbuh subur bersamaan dengan tumbuhnya partai-partai yang berbasis nasionalis dan agama. Dalam situasi ini Australia mulai bersikap lunak dengan harapan pemerintahan Indonesia ingin mengajak kerjasamanya dengan baik untuk mencegah penyebaran faham komunis, kerjasamanya dalam bentuk bantuan kepada pemerintah Indonesia berupa berbagai macam pinjaman. Puncaknya adalah Australia dengan dukungan penuh Amerika Serikat mendesak kepada pemerintah kerajaan Belanda untuk mengembalikan Irian Barat ke Pangkuan Republik Indonesia.[[2]](#footnote-3)

Rasa simpati tersebut pernah diungkapkan Menteri Luar Negeri Australia, Dr.Herbert Vere Evvat pada bulan April 1943 dalam kunjungannya ke Amerika Serikat, yang menyarankan agar “Hindia Belanda dan Australia dapat menjadi mitra erat dalam mengembangkan dan mendatangkan cara hidup yang lebih baik lagi bagi rakyat Indonesia”. Segera setelah kaum nasionalis Indonesia, dibawah pimpinan Soekarno dan Muhammad Hatta, menyatakan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, kaum buruh galangan kapal Australia mewujudkan dukungan dan simpati mereka dengan melarang semua kapal Belanda memasuki perairan Australia. Hal ini disebabkan karena Belanda menggunakan Australia sebagai pelabuhan untuk menguasai kembali Republik Indonesia, yang kala itu belum terbentuk melalui tindakan militer. Peristiwa inilah yang menyatukan hubungan kedua bangsa, serta menempatkan Australia adalah “kawan” dalam pandangan bangsa Indonesia.[[3]](#footnote-4)

Pada masa awal pemerintahan Indonesia oleh Soeharto dalam menghadapi situasi ekonomi yang sulit, oleh sebab itu masa pemerintah Orde Baru mengubah arah kebijakannya dalam pemerintahan dari kebijakan politik menjadi penekananya kepada kebijakan ekonomi. Hal ini menjadikan hubungan diplomatik Australia dengan pemerintahan Indonesia mesra lagi. Dengan diarsiteki oleh mafia-mafia Barckeley bermazhab liberal yang dikomandoi oleh Prof. Soemitro Joyohadikusumo, Indonesia berhasil maju pesat perekonomiannya. Mulai dari naiknya pendapatan perkapita, pertanian, pembangunan infrastruktur, serta berorientasi pada usaha penyelamat ekonomi nasional yang berhasil dengan gemilang. Melihat perkembangan ekonomi Indonesia semakin maju, pemerintah Australia meningkatkan serta memberikan bantuan misalnya pendidikan,ekonomi, bahkan bantuan militer. Indonesia mengalami stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Namun hubungan kedua negara kembali terkoyak, ketika msuknya wilayah Timor Timur dikala itu kedalam Negara Kesatuan Republik indonesia (NKRI) tahun 1976. Australia masih menahan diri mengingat akan dampak yang dapat ditimbulkannya, apabila Indonesia tidak menganeksasi Timor Timur.

Pemerintahan Australia dan bahkan AS tidak ada pilihan selain bersikap pura-pura setuju, pertimbangannya adalah lebih baik membiarkan berintegrasinya Timtim ke wilayah Indonesia dari pada dikemudian hari terjadi kebangkitan partai komunis di Timor-timur yang akan membahayakan kedaulatan Australia yang dinilainya jauh lebih berbahaya dari sekedar masalah Timtim.[[4]](#footnote-5)

Selama masa pemerintahannya, Soeharto juga berperan dan berpengaruh kuat dikalangan militer, birokrasi maupun bisnis. Hal itulah yang membuat peran sebagai presiden menjadi sentral pemerintahan. Militer menjadi sumber utama untuk menegakkan ketertiban, peraturan dan undang-undang. Semua itu dilakukan untuk mempertahankan eksistensi pemerintahan Soeharto di Indonesia. Siapapun yang menentang kebijakan Presiden maka militer akan bertindak sebagai penegak hukumnya.[[5]](#footnote-6)

Pada masa pemerintahan Prof. BJ Habibie, tekanan internasional sedemikian gencar, PM Australia Jhon Howard menyarankan kepada pemerintah Indonesia agar diadakan jajak pendapat dan berakhir dengan lepasnya Tim-tim pengakuan wilayah Republik Indonesia. Isu HAM kadang dimunculkan kembali yang terakhir meniupkan terorisme dengan ditunjang dana besar serta dukungan AS dan sekutunya, membuat isu baru tentang islam melalui geraknan-gerakan yanbg dituduhkannya sebagai gerakan terorisme, mereka dalam program jangka panjangnya menempatkan islam lebih berbahaya dari komunis.

Upaya menyudutkan pemerintah Indonesia yang dianggap dengan nafas islam semakin kencang, Australia melakukan tindakan keji dan memalukan layaknya tindakan penjahat kambuhan, memata-matai sejumlah pejabat Indonesia dengan menyadap percakapan telepon mereka termasuk melalui kedutaannya di Jakarta.[[6]](#footnote-7)

Pada masa pemerintahan Abdurahman Wahid kebijakan luar negeri adalah yang paling mendapat banyak perhatian dari berbagai pihak terutama dari kalangan politikus, dengan seringnya kegiatan perjalanan diplomatik yang dilakukan Abdurahman Wahid, sementara masih banyak permasalahan dalam negeri yang belum terselesaikan antara lain tuntutan demokratisasi, pengungkapan kasus pelanggaran HAM, ancaman separatisme, dan krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Seringnya presiden Abdurahman Wahid mengadakan kunjungan diplomatik, sebenarnya dimaksudkan untuk mendapatkan investasi asing yang diperlukan untuk pemulihan ekonomi Indonesia juga sebagai upaya untuk meminta dukungan negara-negara asing dalam mengenai konflik, serta mempertahankan integritas territotial Indonesia.[[7]](#footnote-8)

Presiden Abdurahman Wahid juga berkomitmen untuk memperbaiki hubungan dengan Australia yang renggang akibat permasalahan Timor Timur. Australia sebenarnya menjadi tempat kunjungan presiden, sehingga mendapat respon positif dari pihak Australia. Namun kunjungan yang dimaksud tertunda sampai beberapa kali sehingga meninggalkan kesan kalau Indonesia kurang memperhatikan hubungannya dengan Australia terutama dengan politik luar negeri yang dijalankan oleh pemerintahan Abdurahman Wahid dengan usaha membina hubungan-hubungan baru dengan berbagai negara, namun tanpa rencana yang terumuskan dengan jelas.[[8]](#footnote-9) Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya hubungan Indonesia-Australia terus memanas sejak permasalahan Timor timur. Faktor yang menyebabkan kedua negara masih terjalin hubungan bilateral adalah kedekatan geografis dan kedekatan menjaga secara bersama keamanan daerah perbatasan.[[9]](#footnote-10) Meskipun demikian, peresiden Abdurahman Wahid tetap memberikan perhatian kepada Australia. Bahkan presiden Abdurahman Wahid mengemukakan gagasan untuk dialog bagi negara-negara dikawasan pasifik barat daya yang disambut baik oleh Australia.[[10]](#footnote-11)

Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri sejak tahun 2001 hubungan bilateral Indonesia dengan Australia dapat dikatakan masih dingin. Hal tersebut dikarenakan adanya sejarah masa lalu di tahun 1999 yaitu ketika Australia ikut campur tangan atau intervensi dalam penyelesaian masalah Timtim. Intervensi yang dilakukan Australia tersebut tentu saja merusak hubungan bilateral dengan Indonesia apalagi dalam membela tindakannya di Timtim, Australia memposisikan diri sebagai wakil Amerika Serikat di Asia.[[11]](#footnote-12)

Pemerintah Megawati berupaya untuk membangun dan menciptakan peran masyarakat Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional, yang berorientasi pada pencapaian kepentingan nasional sebagai upaya untuk memulihkan citra dan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia.[[12]](#footnote-13)

Beberapa kerjasama yang telah dilakukan selama ini adalah Latihan Kartika-Kangaro (TNI-AD), Latihan Albatros (TNI AU) dan Latihan Kakadu, Latihan Cassoary, Passex dan Latihan Cakrawala baru, serta pengadaan kapal patrol dan pesawat Nomad (TNI AL). Kendati kerja sama militer kedua negara sempat terganggu akibat krisis Timor Timur tahun 1999 dengan dihentikannya seluruh kegiatan DPC kecuali program pendidikan, kedua pihak berupaya kembali memperbaiki kerja sama bilateralnya yang ditandai dengan penyelenggaraan pertemuan informal pejabat Dephan RI dan Dephan Australia 2001. Selanjutnya kerjasama pertahanan kedua negara kembali membaik, seperti dilihat dari kegiatan-kegiatan bersama yang diselenggarakan Dephan, angkatan bersenjata dan satuan angkatan bersenjata kedua negara. Selain dialog strategis pertahanan, beberapa kegiatan bersama lainnya adalah penelitian dan analisis bidang intelijen, seminar keamanan maritim, manajemen konsekuensi dan kontra terorisme dan seminar tentang pasukan penjaga perdamaian.[[13]](#footnote-14)

Begitu pula upaya kerjasama yang dilakukan paska bom Bali kedua negara sepakat membentuk *Joint Investigation and Intelligence Team to Investigate Bali Bombing* pada 16 oktober 2002. Adapun tujuan dibentuknya tim investigasi ini adalah melakukan kerjasama antara Kepolisian Indonesia (Polri) dengan pihak *Australian Federal Police* (AFP) untuk mengidentifikasi para korban pemboman dan upaya untuk menangkap para pelaku pemboman Bali.[[14]](#footnote-15) Dalam hal ini pemerintah Australia juga membentuk *Joint Counter-Terrorism Intelligence Coordination Unit* yakni dengan mengirimkan 46 petugas untuk membantu penyelidikan Kepolisian Indonesia terhadap peristiwa bom Bali serta turut membantu dalam melacak buronan teroris Malaysia Dr. Azhari dan Noordin M. Top sebagai toko sentral dari berbagai pemboman di Indonesia terutama peristiwa bom Bali. Upaya lainnya juga dilakukan adalah kembali mengadakan *Bali Regional Ministerial Meeting on Counter Terorisme* di Nusa Dua Bali pada 4-5 Februari 2004 yang diprakarsai oleh pemerintah Indonesia dan Australia dengan beberapa negara Asia Pasifik yang bertujuan untuk memperkuat upaya regional dalam melawan terorisme, khususnya dalam area penegakan hukum berbagai informasi dan kerangka hukum.[[15]](#footnote-16)

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memprioritaskan isu terorisme dan juga lebih meningkatkan kerjasama kontra-terorisme terutama dengan Australia yang dilakukan dengan membuat kebijakan kontra-terorisme baru untuk menjaga keamanan nasional Indonesia. Dengan adanya kebijakan kontra-terorisme yang baru antara Indonesia dengan Australia diharapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonis diantara keduanya. Berikut ini beberapa kerjasama yang telah dilakukan oleh indonesia dan Australia selama masa pemerintahan SBY seperti yang dilakukan pada Februari 2005 bersama dengan pemerintah Australia dan Indonesia membangun suatu program bantuan untuk meningkatkan pengembangan intelijen serta kemampuan dan pengawasan untuk menjaga keamanan pelabuhan Indonesia.

Selain itu mulai terdapat persetujuan tentang pengaturam dalam kerjasama Indonesia-Australia yang berupa *Aviaton Security Capacity Building Project* yang telah ditandatangani pada bulan Maret 2005. Kerjasama tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mencegah msuknya para pelaku teroris ke Indonesia melalui jalur laut maupun daratan yang melewati perbatasan. Begitu juga dengan adanya pertemuan bilateral yang dilakukan pada 3-6 April 2005.[[16]](#footnote-17)

Dalam perjalananya, hubungan kedua negara telah mengalami berbagai dinamika seiring dengan berbagai perubahan yang terjadi di kedua negara, kawasan, dan lingkungan global. Lebih dari satu dekade terakhir hubungan kedua negara berkembang menjadi lebih kuat dan komprehensif. Untuk memperkuat landasan kerjasama dan kemitraan komprehensif, kedua negara telah memiliki *Joint Declaration on Comprehensive Partnership Between Australia and the Replublic of Indonesia* (2005) dan *Agreement Between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation* atau Traktat Lombok (2006).[[17]](#footnote-18) Australia dan Indonesia menegaskan kembali komitmen mereka untuk memperkuat hubungan bilateral di Agustus 2014 dengan menandatangani pemahaman bersama dalam pelaksanaan Perjanjian Lombok. Kesepahaman bersama memberikan pendekatan sepakat untuk meningkatkan kerjasama intelijen antara badan-badan Australia dan Indonesia.[[18]](#footnote-19)

Penandatanganan kerjasama keamanan Indonesia-Australia yang mengambil tempat di pulau Lombok merupakan pertanda seolah ingin menyampaikan bahwa perairan Selat Lombok sangat vital dalam keamanan nasional Australia. Perjanjian kerjasama keamanan yang ditandatangani Menteri Luar negeri kedua negara mengatur kerjasama pada 10 bidang. Kesepuluh bidang itu meliputi pertahanan, keamanan maritim, intelijen, kontra terorisme, pencegahan proliferasi senjata pemusnah missal, tanggap darurat bencana alam, pengakuan hukum, keselamatan dan keamanan penerbangan, kerjasama di dalam organisasi internasional dan kerjasama antar masyarakat.[[19]](#footnote-20)

Indonesia adalah negara yang penting bagi Australia, begitu juga Indonesia. Situasi demikian membuat kedua negara harus menciptakan suatu kemitraan yang sehat, yang dapat menjamin kestabilan hubungan kedua negara dalam interaksi politik internasional. Namun dalam perkembangannya, hubungan tersebut diwarnai oleh nuansa-nuansa yang memperburuk hubungan tersebut dari waktu ke waktu. Mulai dari persoalan konfontasi Indonesia dengan Malaysia, persoalan timur-timur, persoalan separatis Papua, dan permasalahan-permasalahan lainnya antara kedua negara yang dipenuhi tarik ulur konflik. Namun selama itu, kedua negara masih mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Namun adanya penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia, menambah deretan panjang kusutnya hubungan diplomatik antara kedua negara.

Terbongkarnya kasus penyadapan terhadap Presiden SBY, Ibu negara, dan sejumlah menteri oleh intelijen Australia membuat hubungan antara Indonesia dan Australia mengalami ketegangan. Hal ini sesuai dengan informasi rahasia yang dibocorkan mantan konsultan Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat (AS) Edward Snowden bahwa terdapat 90 negara termasuk Indonesia yang disadap oleh Badan Intelijen AS dan Australia. Menurut dokumen tersebut, penyadapan yang dilakukan oleh *Defence Signal Directorate* (DSD), yang merupakan bagian dari dinas Intelijen Australia menyadap Presiden Indonesia sebanyak 15 kali pada bulan Agustus 2009. Penyadapan juga dilakukan terhadap sejumlah pejabat Indonesia.[[20]](#footnote-21)

Pada tahun 2007, Badan Intelijen Australia yang bernama *Defence Signals Directorate* (DSD) datang ke Bali yang pada saat itu menjadi tuan rumah dalam acara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa. DSD yang kemudian berganti nama pada tahun 2013 menjadi *Australian Signals Directorate* (ASD) membawa tugas khusus selama berada di Indonesia.[[21]](#footnote-22)

Setelah mereka mendapatkan informasi yang mereka inginkan, mereka memasukan data-data tersebut ke dalam tim mereka untuk dimonitor dan diseleksi informasinya dari komunikasi yang mereka dapatkan.DSD dengan usahanya ini hanya mendapatkan satu nomor telepon pejabat yaitu nomor telepon Irjen Pol. Paulus Purwoko, Kepala Kepolisian Daerah Bali, usaha yang dilakukan DSD tidak berhenti sampai disana saja. DSD kembali melakukan aksinya secara intensif dan sistematis di Jakarta, bahkan mereka membangun jaringan penyadapannya di Indonesia melalui kantor Kedutaan Besar yang berada di Jakarta.

Seorang mantan perwira yang bekerja di DSD mengatakan Indonesia terdapat titik koordinat dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan Australia yakni di Kedutaan Besar Australia yang terletak di Jalan rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, menjadi lokasi dimana Australia mengumpulkan data-data tersebut. Australia belum puas sampai disana, Konsulat Jendral Australia dalam mengumpulkan informasi terkait dengan data intelijen.[[22]](#footnote-23)

Indonesia bertambah kesal setelah mengetahui pernyataan dari Perdana Menteri Australia, Tony Abbott yang mengatakan bahwa setiap badan dan agen intelijen yang bekerja untuk Australia selalu melaksanakan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Ia tidak dapat memberi kejelasan mengenai isu penyadapan ini.

Kerjasama di bidang kemiliteran atau bidang keamanan antara Indonesia dengan Australia dihentikan, sejak kemunculan masalah penyadapan tersebut terhadap beberapa pejabat tinggi Indonesia. Menteri pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan bahwa kerjasama militer dengan Australia dihentikan hingga ada kebijakan baru dari pemerintah terkait masalah penyadapan. Selain di bidang kemiliteran, kerjasama yang dihentikan juga meliputi pertukaran data intelijen. Purnomo menegaskan, penghentian kerjasama itu tidak merugikan Indonesia. Sebab, selama ini TNI tidak pernah bergantung pada Australia.[[23]](#footnote-24)

Pada akhirnya Australia sedikit terusik dengan adanya ancaman dari Kementrian Luar Negeri yang akan mengakhiri hubungan kerjasama di bidang penangkalan terorisme dan perdagangan manusia dengan Australia. Moriarty mengatakan hubungan kerjasama yang terjalin antara Australia dengan Indonesia selama ini sangat erat. Australia sangat menghormati hubungan kemitraan yang sudah lama terjalin diantara keduanya, ia juga mengatakan bahwa hubungan bilateral ini sangat menguntungkan untuk kedua negara dan Australia berharap kerjasama lainnya terutama di bidang penanggulangan terorisme dan perdagangan manusia.

Pada 7 November 2013, Australia melalui menteri pertahanannya yang bernama David Johnston datang ke Indonesia untuk menghadiri pertemuan dengan Menteri Pertahanan RI. Australia mengutus Johnston untuk dating ke Indonesia sebagai bentuk tanggapan atas berbagai pemberitaan di Indonesia yang menyudutkan Australia. Pertemuan tersebut tidak menghasilkan sesuatu yang memuaskan bagi Indonesia. Purnomo Yusgiantoro selaku Menteri Pertahanan RI menyebutkan kedua negara sepakat untuk melimpahkan isu penyadapan kepada Kementrian Luar Negeri Australia dan Indonesia. Hal ini disepakati mengingat isu penyadapan ini berkaitan erat dengan hubungan diplomatik antar dua negara.[[24]](#footnote-25)

Berdasarkan pemaparan tersebut, penyadapan yang kerapkali dilakukan oleh Australia kepada Indonesia yang memakan waktu cukup lama dan belum adanya konvensi internasional yang mengatur secara khusus mengenai penyadapan, serta penyadapan dapat merugikan hak-hak negara Indonesia dalam merahasiakan informasi intelijen negara, maka penulis mengajukan judul skripsi yaitu :

**“HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-AUSTRALIA PASCA KASUS PENYADAPAN PADA ERA PEMERINTAHAN SBY DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KERJASAMA MILITER INDONESIA-AUSTRALIA”**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, ada beberapa pernyataan yang dimunculkan sebagai identifikasi masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan bilateral Indonesia dengan Australia pasca penyadapan?
2. Bagaimana kerjasama militer Indonesia-Australia pasca penyadapan?
3. Bagaimana implikasi atas yang dilakukan Australia terhadap Indonesia dalam hubungan kerjasama militer?
4. **Pembatasan Masalah**

Mengingat begitu kompleksnya masalah dan berbagai fenomena yang terjadi, maka diperlukan suatu pembatasan masalah agar lebih fokus dan mencapai target peneliti, oleh karena itu agar pembahasan ini terarah dan tidak jauh melenceng dari objek penelitian, maka penulis melakukan pembatasan masalah dengan memfokuskan penelitian pada hubungan bilateral dan implikasi program-progam kerjasama keamanan militer Indonesia-Australia pasca kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia kepada beberapa pejabat di Indonesia.

1. **Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dilakukan dengan cara menarik masalah dari identifikasi masalah dalam bentuk pertanyaan yang bersumber dari permasalahan yang telah dipilih, maka dari itu peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : **“Bagaimana hubungan bilateral Indonesia dengan Australia dalam kerjasama keamanan pasca penyadapan yang dilakukan oleh Australia?”**

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini pada hakekatnya mempunyai tujuan dan kegunaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan dari sumber yang jelas dan membahas tentang hubungan bilateral Indonesia-Australia pasca penyadapan dan implikasi militer Indonesia-Australia.

1. **Tujuan Penelitian**
2. Mengetahui dan memahami lebih jauh bentuk kerjasama bilateral yang dilakukan Indonesia-Australia yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan kedua negara.
3. Memperoleh dan mendapatkan pemahaman tentang awal mula terjadinya penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap beberapa pejabat di Indonesia.
4. Mengetahui pengaruh-pengaruh negatif atau efek dari tindakan penyadapan.
5. Mengetahui tindakan yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap Australia terkait kasus penyadapan tersebut.
6. **Kegunaan Penelitian.**
7. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang keamanan internasional, terutama keamanan negara terkait kasus penyadapan.
8. Sebagai bahan masukan atau pemikiran untuk pengembangan dan pengkajian Ilmu Hubungan Internasional.
9. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada mahasiswa lainnya mengenai pentingnya keamanan negara.
10. **Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**
11. **Kerangka Pemikiran**

Sebagai pedoman untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menggunakan kerangka pemikiran deduktif dengan kerangka konseptual yang nantinya bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah dengan mempergunakan teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli pengamat internasional sebagai penunjang dan sebagai dasar pemikiran dari penelitian ini. Kerangka pemikiran yang penulis gunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan masalah yang akan diteliti yakni hubungan bilateral Indonesia dengan Australia dalam bidang pertahanan dan keamanan militer pasca kasus penyadapan.

Mengawali pemaparan dalam kerangka pemikiran ini, terlebih dahulu perlu memahami tentang definisi dari hubungan internasional itu sendiri. Pengertian dari hubungan internasional adalah :

**Hubungan Internasional merupakan hubungan yang sangat kompleksitas karena didalamnya terdapat atau terlibat bangsa-bangsa yang masing-masing berdaulat sehingga memerlukan mekanisme yang lebih rumit daripada hubungan antar kelompok.**[[25]](#footnote-26)

Sedangkan menurut J.C Johari pengertian Hubungan Internasional, yaitu :

 **Hubungan Internasional merupakan sebuah studi tentang interaksi yang berlangsung diantara negara-negara berdaulat disamping itu juga studi tentang pelaku-pelaku non negara (non states actors) yang perilakunya memiliki dampak terhadap tugas-tugas negara.[[26]](#footnote-27)**

Politik internasional biasanya terintegrasi dari aktor-aktor politik yang berperan sebagai pengambil keputusan dalam politik luar negeri suatu negara. Politik luar negeri merupakan pencerminan dari karakteristik suatu negara dalam upaya berperan dalam urusan-urusan internasional, yang secara langsung menunjukan arah tindakan atau sikap suatu negara sebagai instrument yang diperlukan setiap negara dalam melakukan hubungan internasional dengan aktor-aktor hubungan lainnya. Pengertian politik luar negeri diartikan sebagai berikut :

**Kumpulan kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan luar negerinya, ia (politik luar negeri) merupakan bagian dari kebijakan nasional dan semata-mata dimaksudkan untuk mengabdi pada tujuan yang telah ditetapkan khususnya untuk menghadapi kurun waktu yang sedang dihadapinya. Selanjutnya merupakan pola sikap ataupun respon terhadap lingkungan ekologisnya. Respon tersebut mempunyai latar belakang yang berinteraksi dengan presepsi pengalaman dan kekayaan alam serta kebudayaan yang dimanifestasikan sebagai falsafah dan diakomodasikan dalam konstitusi.[[27]](#footnote-28)**

Telah menjadi bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bahwa setiap bangsa-bangsa di dunia ini akan melakukan interaksi antar bangsa-bangsa yang mana terselenggaranya suatu hubungan internasional baik melalui berbagai kriteria seperti terselenggaranya suatu hubungan yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kusumohamidjodjo tentang hubungan bilateral, yaitu :

**Suatu bentuk kerjasama diantara negara-negara yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh diseberang lautan denngan sasaran utama untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik kebudayaan dan struktur ekonomi.[[28]](#footnote-29)**

Terdapat keterkaitan antara hubungan internasional dengan kerjasama internasional. Kartasasmita menjelaskan bahwa Kerjasama Internasional terjadi karena *‘nation understanding’* dimana mempunyai arah dan tujuan yang sama, keinginan di dukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama di antara negara-negara namun kepentingan itu tidak identik.[[29]](#footnote-30)

Dalam konteks ini, konflik terjadi yang ada pada hubungan bilateral Indonesia-Australia di bidang pertahanan dapat diselesaikan dengan kerjasama semua pihak agar konflik yang terjadi meredam. Dalam buku yang sama Holsti juga menjelaskan bahwa konflik dapat diartikan sebagai tahapan tindakan kekerasan tertentu atau pertentangan sederhana mengenai beberapa masalah tertentu. Akibat dari konflik sendiri bias berupa dua kemungkinan yaitu tetap berlanjut ke konflik yang lebih besar atau dapat terselesaikan melalui prosedur dalam bentuk kompromi, dimana kompromi merupakan salah satu kemungkinan dari hasil dalam menyelesaikan konflik.[[30]](#footnote-31)

Konflik terjadi dimana biasanya kelompok atau individu berusaha untuk mencapai tujuannya tersebut dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Konflik adalah tindakan yang mengarah pada pemakaian kekerasan yang terorganisir muncul akibat dari posisi yang sering bertentangan, sikap bermusuhan dan tindakan militer atau diplomatik dari beberapa kelompok tertentu atau suatu permasalah kelompok yang terlibat dalam konflik biasanya tidak selalu bertentangan dengan pemerintahan bangsa dan negara.[[31]](#footnote-32)

 Dalam dunia internasional, kerjasama antar negara adalah suatu hal yang lumrah. Hal ini karena setiap negara, seberapapun majunya ataupun berhasilnya, negara tersebut tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri tanpa bekerjasama dengan negara lain. Seperti halnya kerjasama bilateral adalah suatu hubungan diplomatik, budaya dan ekonomi diantara dua negara. Sebagai contoh hubungan bilateral Indonesia dan Australia. Kebanyakan kerjasama yang dilakukan secara bilateral seperti pertukaran pelajar, proses ekspor impor dan kunjungan kenegaraan. Ketika suatu negara menjalin kerjasama dengan negara lainnya pasti memiliki kepentingan nasional masing-masing yang menjadi landasan utamanya.

 Menurut Hans J. Morgenthau kepentingan nasional adalah :

**”Kepentingan Nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bias membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan dan pengendalian itu bias diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama.”[[32]](#footnote-33)**

 Setiap negara memiliki motivasi dan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut dilakukanlah hubungan interaksi dan kerjasama dengan negara lain maupun dengan organisasi internasional adalah untuk memenuhi kepentingan negara yang sulit untuk dilakukan sendiri. Setiap negara dalam mengeluarkan kebijakan yang mana berkenaan dengan segala sesuatu yang melewati batas suatu negara pastilah memakai kebijakan luar negeri sebagai landasannya.

Menurut James N. Rosenau, Gavin Boyd dan Kenneth W. Thompson dalam buku “*World Politics : An Introduction*” pengertian kebijakan luar negeri yang telah diterjemahkan adalah upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Kebijakan luar negeri menurutnya ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara.[[33]](#footnote-34)

Menurut K.J. Holsti kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
2. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
3. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan,
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melakukan persetujuan.
5. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.[[34]](#footnote-35)

Menurut Barry Buzan dalam bukunya yang berjudul *People State and Fear: An Agenda for International Security Studies in Post Cold War Era*, bahwa keamanan tidak sebatas pada keamanan saja, tetapi mencangkup keamanan militer, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan. Keamanan militer mencangkup interaksi antar dua tingkat dan kekuatan yaitu kemampuan defensive dan persepsi militer mengenai intensi masing-masing pihak.[[35]](#footnote-36)

Dilema keamanan terjadi didasari oleh dua kondisi, yaitu bahwa setiap negara mempunyai perilaku selalu ingin mengejar kekuasaan atau kekuatan untuk kepentingan nasionalnya dan yang kedua akibat perilaku tadi sistem yang tercipta terjadi menjadi anarki dimana masing-masing negara akan berusaha mempertahankan dirinya dari ancaman pihak lain atau dapat dikatakan mengejar atau pencapaian keamanan. Dilemma akan terjadi pada suatu negara karena ia merasa takut akan ancaman kekalahan dari pihak lain yang dicurigai terus mengembangkan kekuatan militernya, sehingga suatu negara mengembangkan kekuatan militernya agar dapat mengimbangi negara lain.[[36]](#footnote-37)

1. **Asumsi**

Berdasarkan kerangka teoritis diatas penulis mendapatkan asumsi bahwa;

1. Kasus penyadapan yang dilakukan oleh pemerintah Australia terhadap Indonesia mempengaruhi hubungan kedua negara tersebut seperti pemberhentian kerjasama dalam bidang keamanan terutama militer.
2. Kasus penyadapan yang dilakukan Australia tehadap Indonesia membuat kerjasama dalam bidang keamanan terutama dalam bidang milter mengalami pasang surut.
3. Kasus penyadapan yang dilakukan oleh pemerintah Australia terhadap Indonesia memiliki motivasi untuk kepentingan negaranya sendiri yang disebut ‘*national interest*’.
4. **Hipotesis**

Berdasarkan kerangka teoritis dan permasalahan diatas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut: **Dengan kasus penyadapan Australia terhadap Indonesia, maka hubungan bilateral Indonesia-Australia mengalami pasang surut dibidang kerjasama militer.**

1. **Operasional Variabel dan Indikator**

**Tabel 1.1**

**Operasional Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variable dalam hipotesis (Teoritis) | Indikator (Empirik) | Verifikasi (Analisis) |
| Variable bebas : hubungan bilateral Indonesia – Australia paca penyadapan | 1. Hubungan Indonesia dan Australia kembali membaik.
2. Adanya perjanjian baru antara kedua negara.
 | Pemerintah Australia berusaha memperbaiki hubungannya dengan Indonesia.<http://www.voaindonesia.com/a/australi-berusaha-perbaiki-hubungan-dengan-indonesia/1800026.html>1. Hubungan Indonesia dan Australia berangsur pulih.

http://fokus.news.viva.co.id/news/read/533139-mengakhiri-ketegangan-ri-dan-australia-soal-penyadapan |
| Variable terikat : Kerjasama Indonesia – Australia dalam bidang militer. | 1. Adanya peningkatan keamanan antara kedua negara.
 | 1. Meningkatnya keamanan antara Indonesia dan Australia.

http://jaringnews.com/internasional/asia/22229/indonesia-dan-australia-kerjasama-pertahanan-dan-keamanan |

1. **Skema kerangka Teoritis**

INDONESIA

AUSTRALIA

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

HUBUNGAN BILATERAL

POLITIK LUAR NEGERI AUSTRALIA

KONSEP KEAMANAN

KERJASAMA KEAMANAN

KERJASAMA MILITER INDONESIA-AUSTRALIA PASKA PENYADAPAN

1. **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**
2. **Tingkat Analis**

Tingkat analisis yang di pakai dalam penelitian ini adalah Analisa Korelasionis dimana terdapat hubungan atau pengaruh antara variable yang satu dengan yang lainnya berdasarkan data-data atau fakta-fakta yang ada. Berdasarkan judul yang diambil oleh penulis, apakah hubungan bilateral Indonesia- Australia pasca kasus penyadapan dan implikasinya terhadap kerjasama militer Indonesia – Australia.

1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian atau pendekatan yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini adalah Deskriptif Analisis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan, mengklasifikasi serta menganalisis gejala-gejala atau fenomena-fenomena aktual berkaitan dengan objek penelitian. Metode deskriptif merupakan metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, menginterprestasian data yang kemnudian dilanjutkan dengan menganalisa data atau fenomena tersebut sebagai objek peelitian, sebagaimana objek dalam penelitian ini yakni : hubungan bilateral Indonesia – Australia pasca kasus penyadapan dan implikasinya terhadap kerjasama militer Indonesia – Australia.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari data-data dari kepustakaan buku informasi-informasi berdasarkan penelaah literature atau referensi baik yang bersumber dari artikel-artikel, majalah surat kabar, jurnal, buletin-buletin, internet maupun catatan-catatan penting mengenai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

1. **Lokasi dan Lamanya penelitian**
2. **Lokasi Penelitian**
3. Perpustakaan FISIP UNPAS

Jl. Lengkong Besar No. 68, Bandung.

1. Perpustakaan FISIP UNPAR

Jl. Ciumbuleuit No.94, Bandung.

1. **Lamanya Penelitian**

Peneliti memperkirakan penelitian ini, akan dilaksanakan selama enam bulan, dimulai pada bulan Desember 2016 sampai Juni 2017.

1. **Sistematika Penulisan**
2. Pada BAB I berisikan pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Operasional Variabel dan Indikator, Skema Kerangka Teoritis, Metode dan Teknik Pengumpulan Data, Tingkat Analisis, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Waktu dan Lokasi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
3. Pada BAB II berisikan tentang hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia.
4. Pada BAB III berisikan tentang keamanan militer Indonesia-Australia.
5. Pada BAB IV berisikan tentang kondisi hubungan bilateral Indonesia-Australia di bidang keamanan militer pasca penyadapan.
6. Pada BAB V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian terutama dari pembahasan (BAB IV)
1. Aji Mimbarno, “Membangun Hubungan Pertahanan Negara Tentara Nasional Indonesia dan Australian Defence Force sebagai Mitra Sejajar”. <http://ikahan.com/wp-content/uploads/2013/07/Essay-2013-SECOND-Place-Aji-Mimbarno.pdf>. diakses 21 februari 2017 [↑](#footnote-ref-2)
2. http://www.kompasiana.com/imamkodrimirkasan/era-baru-kerja-sama-indonesia-australia\_54f8ef1da33311d33b8b4864 [↑](#footnote-ref-3)
3. Z.Aulia,”Pasang Surut Hubungan Indonesia-Australia”, <http://publikasi.umy.ac.id/files/journals/8/articles/386-1473-1-PB.pdf>, diakses 20 Oktober 2016 [↑](#footnote-ref-4)
4. *Op. Cit* http://www.kompasiana.com/imamkodrimirkasan/era-baru-kerja-sama-indonesia-australia\_54f8ef1da33311d33b8b4864 [↑](#footnote-ref-5)
5. https://frenndw.wordpress.com/category/politik-luar-negeri-indonesia/ [↑](#footnote-ref-6)
6. *Op. Cit* http://www.kompasiana.com/imamkodrimirkasan/era-baru-kerja-sama-indonesia-australia\_54f8ef1da33311d33b8b4864 [↑](#footnote-ref-7)
7. Poltak Partogi Nainggolan,”Diplomasi Ofensif Pemerintahan Wahid:Analisis Dari Perspektif Politik”, Jakarta: Sekjen DPR RI,2001.hlm.5 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid*.hlm.85 [↑](#footnote-ref-9)
9. Hariyadi,”Politik luar Negeri Indonesia Terhadap Australia Pada Masa Setahun Pemerintahan Abdurahman Wahid”, Jakarta: pusat pengkajian dan pelayanan informasi DPR RI, 2001.hlm.218 [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid*.hlm.207-209 [↑](#footnote-ref-11)
11. Jemadu, Aleksius. 2006.”Kebijakan Politik dan Keamanan Australia di Kawasan Asia pasifik’, Jurnal Luar Negeri, Volume 23 Nomor 2, BPPK Departemen Luar Negeri. Jakarta.hal.52 [↑](#footnote-ref-12)
12. http://www.bappenas.go.id/id/ [↑](#footnote-ref-13)
13. *Op.Cit.,* Aji Mimbrano. Diakses 21 februari 2017 [↑](#footnote-ref-14)
14. http://foreignminister.gov.au/Pages/default.aspx [↑](#footnote-ref-15)
15. Wise, M. William.2005. Indonesia’s War On Terror. United State-Indonesia Society.Hal.76 [↑](#footnote-ref-16)
16. Wise, M.William.2005. Indonesia’s war On Terror. United State-Indonesia Society.hal44&74 [↑](#footnote-ref-17)
17. (http://www.kemlu.go.id/canberra/id/Pages/Australia.aspx), diakses 4 februari 2017 [↑](#footnote-ref-18)
18. *Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade*,  [(http://dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/agreement-between-the-republic-of-indonesia-and-australia-on-the-framework-for-security-cooperation.aspx)x](http://dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/agreement-between-the-republic-of-indonesia-and-australia-on-the-framework-for-security-cooperation.aspx), diakses 6 februari 2017 [↑](#footnote-ref-19)
19. *Op.Cit.,*Aji Mimbarno. Diakses 21 februari 2017 [↑](#footnote-ref-20)
20. *Australia Spied on President Leaked Documents Reveal*,  [(http://www.abc.net.au/)/](http://www.abc.net.au/), diakses 14 februari 2017 [↑](#footnote-ref-21)
21. Vivanews, 8 November 2013, “Spionase Kangguru di Tanah Garuda”, (http://sorot.news.viva.co.id/news/read/457214-spionase-kanguru-di-tanah-garuda, 2013), diakses 6 februari 2017 [↑](#footnote-ref-22)
22. *Ibid* [↑](#footnote-ref-23)
23. Jurnal Parlemen,  [(http://www.jurnalparlemen.com/view/7009/tidak-rugi-indonesia-putuskan-kerja-sama-militer-dengan-australia.htm)l](http://www.jurnalparlemen.com/view/7009/tidak-rugi-indonesia-putuskan-kerja-sama-militer-dengan-australia.html), diakses 14 februari 2017 [↑](#footnote-ref-24)
24. *Op.Cit.,*Vivanews. 6 februari 2017 [↑](#footnote-ref-25)
25. Mochtar Mas’eod, 1994. Ilmu Hubungan Internasional: disiplin dan metedologi: LP3SS.Hal.28. [↑](#footnote-ref-26)
26. J.C Johari. 1985. *Internasional Relations and Politics: Theoretical Perspective.* New Delhi. Sterling Publisher.p.9. [↑](#footnote-ref-27)
27. R. Sumpena Prawirasaputra, Politik Luar Negeri. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1984.Hal.7 [↑](#footnote-ref-28)
28. Kusumohamidjodjo, Budiono. 1987. Hubungan Internasional: Kerangka Suatu Analisis. Bandung: CQ Press. [↑](#footnote-ref-29)
29. Koesnadi Kartasasmita,1998. Administrasi Internasional. Hal.03. [↑](#footnote-ref-30)
30. Edratna, Hal-hal yang Perlu diPerhatikan dalam Melakukan Kerjasama. <https://edratna.wordpress.com/2014/07/05/hal-hal-yang-perlu-diperhatikan-dalam-melakukan-kerja-sama/>. [↑](#footnote-ref-31)
31. K.J Holsti, Politik Internasional, Kerangka untuk Analis Jilid2 Terjemahan: M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga, 1988. [↑](#footnote-ref-32)
32. Mohtar Mas’oed, 1990 ilmu hubungan internasional; Disiplin dan Metodelogi, ulasan tentang Morgenthau mengenai konsep Kepentingan Nasional, Jakarta, PT Pustaka LP3ES hlm. 139 [↑](#footnote-ref-33)
33. James N. Rosenau, Gavin Boyd dan Kenneth W. Thompson, *World Politics: An Introduction* (New York: The Free Press, 1976), hlm.27 [↑](#footnote-ref-34)
34. K.J Holsti, *Op. Cit.,*Hal.652-653 [↑](#footnote-ref-35)
35. Barry Buzan, *People State and Fear: An Agenda for International Security Studies in Post Cold War Era.* (Buzan, 1991) [↑](#footnote-ref-36)
36. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-37)